

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA MILITER TNI-AD

YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus di Pengadilan Militer I-03 Padang, Sumatera Barat)

*Diajukan sebagai syarat untuk penulisan Skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

ILHAM BUDIMAN

1610113105

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



Pembimbing ;

Dr. Fadilah Sabri, S.H., M.H

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA MILITER TNI-AD YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus di Pengadilan Militer I-03 Padang, Sumatera Barat)

(Ilham Budiman, 1610113105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV
(Hukum Pidana) 68 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Terhadap tindak pidana narkotika yang telah dilakukan, maka TNI sebagai alat pertahanan Negara haruslah tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan secara khusus diperiksa melalui Peradilan Militer. Meskipun UU No 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 7 Tahun 2009 mewajibkan penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi, namun hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan belum adanya fasilitas rumah sakit yang digunakan sebagai tempat rehabilitasi khusus bagi prajurit TNI aktif. Disamping itu, belum adanya regulasi khusus dari internal TNI menjadi penghambat bagi Oditurat Militer untuk mengesekusi terdakwa untuk melaksanakan rehabilitasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap anggota militer TNI-AD yang menyalahgunakan narkotika? 2) Apakah alasan hakim pengadilan militer Padang tidak menerapkan rehabilitasi medis terhadap anggota militer TNI-AD yang menyalahgunakan narkotika. Metode penelitian dalam skripsi ini secara yuridis empiris serta penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Rehabilitasi belum dapat terlaksana karena belum adanya fasilitas rumah sakit sebagai rehabilitasi khusus bagi prajurit TNI aktif. 2) Rehabilitasi tidak dapat diterapkan kepada anggota TNI-AD yang menyalahgunakan narkotika karena aturan di wilayah pengadilan militer I-03 Padang mewajibkan hakim menjatuhkan hukuman pemecatan. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan perlunya pertimbangan dari hakim untuk dapat menerapkan rehabilitasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan agar mencapai keadilan.

Kata kunci: Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika, TNI